

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Sumber daya alam dan lingkungan hidup memiliki peran strategis dalam meningkatkan keberlangsungan kehidupan makhluk hidup di bumi. Keduanya sangat penting dalam pembangunan, karena keduanya adalah modal dasar bagi negara untuk meningkatkan perekonomian. Namun, saat ini banyak terjadi eksploitasi di tengah tantangan global yang membuat lingkungan hidup semakin memprihatinkan. Salah satu hal yang membuat kondisi lingkungan menjadi memprihatinkan adalah ulah manusia yang mengeksploitasi sumber daya alam tanpa batas. Namun, adanya berbagai fenomena seperti pemanasan global, perubahan iklim yang ekstrim, pencemaran lingkungan, menurunnya keanekaragaman hayati dan sumber daya alam juga menjadi masalah yang terjadi pada lingkungan hidup, serta dapat memberikan dampak bagi masyarakat baik dari ekonomi, pembangunan, pangan, kesehatan, ekosistem, dan infrastruktur.

Hutan di Indonesia merupakan paru-paru dunia dimana hutan tersebut dapat menjaga keseimbangan iklim yang terjadi di dunia. Namun, saat ini banyak terjadi kerusakan hutan di Indonesia. Hal itu disebabkan karena penggundulan hutan dan konversi lahan gambut sehingga Indonesia menjadi salah satu negara pencemar polusi dan menyebabkan terjadi pemanasan global yang mana hal ini terjadi akibat meningkatnya emisi gas karbon dioksida dan gas rumah kaca, sehingga dapat menyebabkan kerusakan pada lapisan ozon. Hal ini dapat menghalangi radiasi ultraviolet matahari yang berdampak buruk untuk makhluk hidup di bumi. Meskipun Indonesia beriklim tropis dan merupakan negara kepulauan terbesar di dunia, faktanya Indonesia masih rentan terhadap kondisi iklim yang terjadi. Kondisi iklim yang tidak menentu ini berawal dari terjadinya pemanasan global. Akibat dari perubahan iklim dapat memunculkan bencana, seperti kekeringan, tsunami, banjir, dan meningkatnya muka air laut. Selain itu, juga menyebabkan musim di Indonesia tidak lagi menentu dan tidak lagi berubah secara teratur.

Sebagai makhluk hidup kita harus senantiasa untuk menghargai alam, karena alam adalah aset yang penting bagi makhluk hidup di bumi. Masyarakat juga diharapkan bisa berperan dalam melakukan hal-hal kecil yang dapat memberikan dampak baik bagi lingkungan hidup. Cara yang bisa dilakukan untuk menjaga dan menghargai alam adalah dengan menjaga keseimbangan dan kelestariannya, serta mencapai pembangunan berkelanjutan berwawasan lingkungan. Sebagai upaya untuk menyelesaikan permasalahan yang ada baik yang berkaitan dengan isu tersebut, dibentuk *Sustainable Development Goals (SDGs)* dimana ini adalah agenda 2030 untuk mencapai pembangunan berkelanjutan yang diikuti oleh 193 Negara anggota PBB. *SDGs* terdiri dari 17 tujuan dan 169 target yang dirancang secara partisipatif dengan melibatkan pemerintah, organisasi sektor swasta, akademisi, dan seluruh masyarakat di dunia pun ikut terlibat di dalam agenda ini.

SDGs memiliki prinsip utama yaitu “*No-one Left Behind*”. Prinsip tersebut berkaitan dengan Keadilan Prosedural dan Keadilan Sustansial. Terdapat empat pilar *SDGs*, yakni sosial, ekonomi, lingkungan, serta pembangunan hukum dan tata kelola. Terdapat 17 tujuan dari *SDGs*, 5 diantaranya termasuk ke dalam pilar lingkungan, yakni atmosfir, tanah, pesisir dan laut, air bersih, serta keanekaragaman hayati. Pilar lingkungan hidup menjadi landasan bagi pembangunan berkelanjutan karena apapun yang berkaitan dengan tersedianya sumber daya alam dengan memperhatikan sekitar, serta adanya upaya pengendalian iklim agar bisa mengurangi risiko terjadinya ancaman bencana. Selain itu, mengelola dan melindungi ekosistem sumber daya kelautan, serta memanfaatkan ekosistem yang berkelanjutan baik di hutan dan lahan yang tertutup vegetasi. Pilar lingkungan ini berkaitan dengan pilar lainnya karena pilar ekonomi dan sosial juga menentukan bagaimana kehidupan makhluk hidup akan berlanjut di bumi.

Untuk menanggapi permasalahan lingkungan hidup yang masih tinggi di Indonesia, maka diberlakukan kebijakan sebagai wujud pembangunan berkelanjutan yang berwawasan lingkungan. Kebijakan tersebut dituangkan ke dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (UUPPLH) sebagai pengganti

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1997 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup . Kebijakan ini dilatarbelakangi oleh hak yang harus diperoleh warga negara untuk mendapatkan lingkungan hidup yang baik dan sehat (Pemerintah Indonesia, 2009). Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 juga berusaha menjawab tantangan yang ada seperti perubahan iklim dan menurunnya kualitas lingkungan hidup menjadi menurun. Upaya pembangunan yang dilakukan adalah atas dasar wawasan yang tepat agar lingkungan hidup dan ekosistemnya tetap terjaga.

UUPPLH didukung oleh beberapa peraturan lain yang berkaitan dengan lingkungan hidup, yakni Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup. Kebijakan tersebut dilakukan untuk melestarikan lingkungan hidup dan untuk mengambil keputusan mengenai penyelenggaraan kegiatan lingkungan hidup di Indonesia, maka diperlukan Analisis Dampak Lingkungan Hidup (AMDAL) yang tercantum dalam Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2021 (Pemerintah Indonesia, 2021). Dengan diberlakukannya kebijakan mengenai lingkungan hidup, diharapkan baik pemerintah maupun masyarakat kesadarannya dapat meningkat dalam melestarikan lingkungan, yakni dengan menumbuhkan rasa kesadaran terhadap lingkungan hidup di Indonesia.

Adanya kebijakan tersebut, Pemerintah Indonesia melalui Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan menyusun Renstra (Rencana Strategis) yang disusun oleh Direktorat Jenderal Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan (Ditjen PPKL) untuk mencapai tujuan dalam mengelola lingkungan hidup yang tercantun di dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) Tahun 2020-2024. Terdapat empat pilar Sasaran Strategi, yakni terwujudnya lingkungan hidup dan hutan yang berkualitas, tercapainya optimalisasi pemanfaatan sumber daya hutan dan lingkungan sesuai daya dukung dan daya tampung lingkungan yang menyeluruh pada pilar ekonomi, adanya keberadaan atas fungsi dan distribusi hutan yang berkelanjutan dan berkeadilan dalam pilar sosial, dan terlaksananya tata kelola dan inovasi pembangunan lingkungan hidup dan hutan, serta sumber daya manusia lingkungan hidup kehutanan dalam pilar tata

kelola (Direktoral Jenderal Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan, 2020).

Berbagai permasalahan yang terjadi harus segera ditangani, mengingat kondisi lingkungan hidup tiap daerah di Indonesia berbeda. Oleh karena itu, Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia (2019) memiliki fungsi untuk mengelola, meningkatkan, dan melakukan pengendalian terhadap lingkungan hidup, sumber daya alam, dan ekosistem. Melalui publikasi yang dikeluarkan oleh Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia, kita bisa mengetahui bagaimana kondisi lingkungan hidup di tiap provinsi di Indonesia melalui Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH). IKLH dapat digunakan sebagai sarana penunjang informasi bagi Pemerintah Indonesia dalam menangani permasalahan lingkungan. IKLH terdiri dari tiga indikator, yakni Indeks Kualitas Air (IKA), Indeks Kualitas Udara (IKU), Indeks Kualitas Tutupan Lahan (IKTL). Ketiga Indeks tersebut, diukur berdasarkan parameter yang berkaitan dengan indikatornya (Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, 2019). Berikut adalah data Indeks Kualitas Lingkungan Hidup dari perhitungan hasil IKA, IKU, IKLH di setiap Provinsi di Indonesia pada tahun 2019.

Tabel 1. 1 Hasil Perhitungan IKA, IKU,IKTL, dan IKLH Tahun 2019

No	Provinsi	IKU	IKA	IKTL	IKLH
1	Aceh	91,08	60,56	76,57	76,12
2	Sumatera Utara	86,58	51,11	52,95	62,49
3	Sumatera Barat	89,40	53,19	67,16	69,64
4	Riau	90,47	53,55	48,15	62,47
5	Jambi	87,17	58,49	60,90	68,06
6	Sumatera Selatan	87,13	64,45	39,84	61,41
7	Bengkulu	92,69	47,64	55,78	64,41
8	Lampung	86,63	55,74	36,65	57,37
9	Bangka Belitung	91,94	69,29	41,21	64,85
10	Kepulauan Riau	90,59	54,00	59,06	67,00
11	DKI Jakarta	67,97	41,94	24,66	42,84
12	Jawa Barat	74,93	45,59	38,70	51,64
13	Jawa Tengah	84,81	51,64	50,08	60,97
14	DI Yogyakarta	85,19	35,37	32,69	49,24
15	Jawa Timur	83,06	50,79	50,23	60,25
16	Banten	74,98	43,11	39,16	51,09
17	Bali	89,85	65,33	41,34	63,09
18	Nusa Tenggara Barat	87,40	40,23	65,67	64,56
19	Nusa Tenggara Timur	88,18	59,48	63,42	69,67
20	Kalimantan Barat	90,07	50,00	59,76	65,92
21	Kalimantan Tengah	88,83	56,80	76,27	74,20
22	Kalimantan Selatan	88,78	55,31	46,78	61,90
23	Kalimantan Timur	90,31	62,01	87,94	80,87
24	Kalimantan Utara	93,79	52,22	87,94	78,98
25	Sulawesi Utara	92,41	45,48	59,45	65,15
26	Sulawesi Selatan	89,56	58,40	58,06	67,61
27	Sulawesi Tengah	92,98	62,59	83,89	80,23
28	Sulawesi Tenggara	90,01	50,55	74,67	72,03
29	Gorontalo	86,88	57,20	79,37	74,97
30	Sulawesi Barat	89,97	56,15	70,48	72,03
31	Maluku	88,72	57,56	89,17	79,55
32	Maluku Utara	92,38	53,61	86,61	78,44
33	Papua Barat	92,56	53,89	100,00	83,96
34	Papua	92,56	47,29	99,58	81,79
35	Indeks Nasional	86,56	52,62	62,00	66,55

Sumber : Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan

Dari Tabel 1.1 di atas dapat diketahui terdapat provinsi di Indonesia yang berada di bawah dan di atas rata-rata Indeks Nasional. Sebanyak 17 Provinsi di Indonesia memiliki IKLH di atas IKLH Nasional dan 17 lainnya memiliki nilai IKLH di bawah IKLH Nasional. Tabel 1.1 menunjukkan bahwa Provinsi Papua Barat memiliki nilai IKTL dan IKLH tertinggi. Sedangkan, Provinsi DKI Jakarta

memiliki nilai IKU, IKTL, dan IKLH paling rendah diantara provinsi lainnya. Rendahnya nilai IKLH di beberapa Provinsi di Indonesia perlu untuk dilakukan upaya untuk bisa meningkatkan kualitas kawasan lingkungan berkelanjutan. Berdasarkan data di atas, Provinsi Jawa Timur sendiri memiliki nilai IKU 83,06; IKA 50,79; IKTL 50,23, dan IKLH 60,25. Menurut data dari Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (2019), Jawa Timur berada pada posisi cukup baik pada Predikat Nilai IKLH secara Nasional pada tahun 2019. Hal ini dibuktikan adanya peningkatan hasil rekapitulasi IKA Nasional dari tahun 2018 menuju tahun 2019 yakni dari nilai 50,00 menjadi 50,79 , serta peningkatan IKU di Jawa Timur juga meningkat dari tahun 2018 ke 2019 yakni dari nilai 81,80 menjadi 83,06.

Sebagai salah satu kota metropolitan di Jawa Timur, Kota Surabaya tidak ingin ketinggalan dalam melaksanakan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup. Dalam melakukan upaya tersebut, Pemerintah Kota Surabaya menyusun dokumen Informasi Kinerja Pengelolaan Lingkungan Hidup Daerah (IKPLHD) Kota Surabaya untuk menjaga kualitas lingkungan hidup di kota Surabaya (Pemerintah Kota Surabaya, 2019). Berikut adalah data IKA dan IKU di Kota Surabaya pada tahun 2016 hingga 2020.

Tabel 1. 2 IKA dan IKU di Kota Surabaya tahun 2016-2020

	2016	2017	2018	2019	2020
Indeks Kualitas Air (IKA)	54,9	57,5	57,62	57,68	57,69
Indeks Kualitas Udara (IKU)	89,45	90,26	90,27	90,30	90,31

Sumber : data DLH Kota Surabaya (data diolah)

Berdasarkan data tersebut, dapat diketahui bahwa terdapat peningkatan dari kualitas air dan kualitas udara di Surabaya. Semakin tinggi nilainya, maka kualitas air dan udara semakin baik. Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan mengeluarkan Peraturan Menteri No. 14 Tahun 2020 tentang Indeks Pencemar Udara dijelaskan bahwa kondisi mutu udara di lokasi tertentu didasarkan kepada dampak terhadap kesehatan manusia, nilai estetika, dan makhluk hidup lainnya digambarkan melalui Indeks Standar Pencemar Udara (ISPU) sehingga dalam pemantauan dilakukan dengan menggunakan perangkat Stasiun Pemantau Kualitas

Udara Ambien (SPKUA) yang mana peralatan ini datanya dapat beroperasi terus-menerus dan dapat dipantau secara langsung.

Kemudian untuk mengatur pengelolaan kualitas air dikeluarkan Peraturan Pemerintah Nomor 82 Tahun 2001 tentang Pengelolaan Kualitas Air dan Pengendalian Pencemaran Air, yang mana kondisi status mutu air ditetapkan untuk menyatakan (1) kondisi cemar, apabila mutu air tidak memenuhi baku mutu air, (2) kondisi baik, apabila mutu air memenuhi baku mutu air. Apabila kondisi cemar terjadi, maka Pemerintah Provinsi/ Kabupaten/ Kota harus melakukan upaya penanggulangan pencemaran dan pemulihankualitas air dengan menetapkan mutu air sasaran.

Kemudian, selain data dari Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, data dari aplikasi IQAir, diketahui bahwa kualitas udara di Surabaya mencapai angka 137 pada hari Sabtu tanggal 30 Juli 2022 yang mana indeks kualitas udara pada aplikasi ini bermanfaat untuk mengetahui dan melaporkan keparahan tingkat kualitas udara dalam kaitannya dengan publik. Diketahui juga bahwa indeks kualitas udara pada aplikasi ini berkisar dari 0 hingga 500, yang mana nilai indeks dengan nilai 0-50 (*good*) menunjukkan kualitas udara yang baik dan pada nilai ini kualitas udara tidak menimbulkan risiko, kemudian nilai 51-100 (*moderate*) menunjukkan bahwa individu yang sensitif terhadap udara, maka dianjurkan untuk menghindari aktivitas di luar ruangan karena dapat memungkinkan mengalami gejala pernapasan.

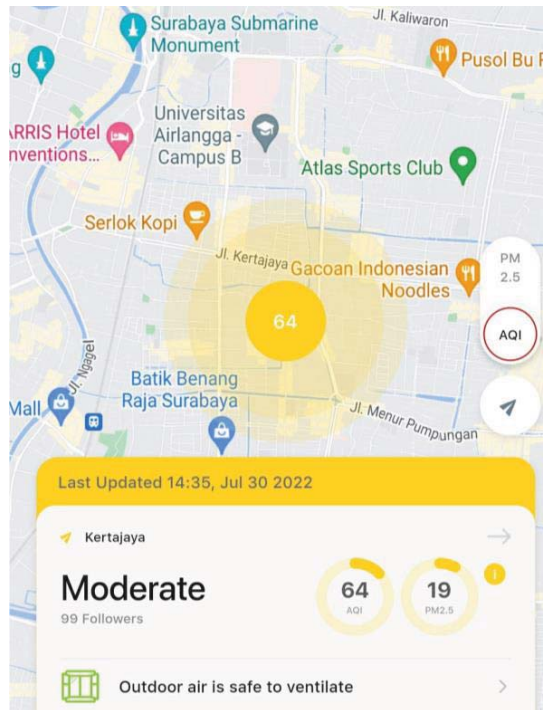
Pada nilai 101-150 (*unhealthy for sensitive groups*) menunjukkan bahwa kualitas udara pada nilai ini tidak sehat untuk kelompok sensitif atau seseorang yang biasanya berisiko mengalami iritasi dan gangguan pernapasan. Nilai 151-200 (*unhealthy*) menunjukkan jika kualitas udara memungkinkan terjadi efek samping dan gangguan pada jantung dan paru-paru dikalangan masyarakat umum, terutama seseorang yang sensitif. Nilai 201-300 (*very unhealthy*) menunjukkan bahwa kualitas udara ini sangat tidak sehat bagi seseorang yang memiliki imun tubuh yang rendah dan seseorang harus lebih berwaspada untuk membatasi aktivitas dan tetap berada dalam ruangan.

Untuk nilai 301-500 (*hazardous*) menunjukkan bahwa kualitas udara pada nilai ini sangat berbahaya dan berisiko tinggi bagi masyarakat atau seseorang yang sensitif mengalami iritasi parah dan kesehatan lain. Berikut data gambar kualitas udara di Kota Surabaya pada Sabtu, 27 Juli 2022 pukul 14.35 WIB.



Gambar 1. 1 Kualitas Udara Kota Surabaya dari Aplikasi *IQAir*

Berdasarkan data gambar di atas, diketahui bahwa kualitas udara di Surabaya berada pada nilai 72 yang berarti *moderate* atau kualitas udara di Surabaya sudah cukup lumayan baik dan bagi seseorang yang mengalami masalah pernapasan yang cukup sensitif, sebaiknya melakukan aktivitas di dalam ruangan saja. Selain itu, diketahui pada aplikasi lain, yakni Nafas, indeks kualitas udara di Surabaya juga masuk ke dalam klasifikasi *moderate*.



Gambar 1. 2 Kualitas Udara Kota Surabaya dari Aplikasi NAFAS

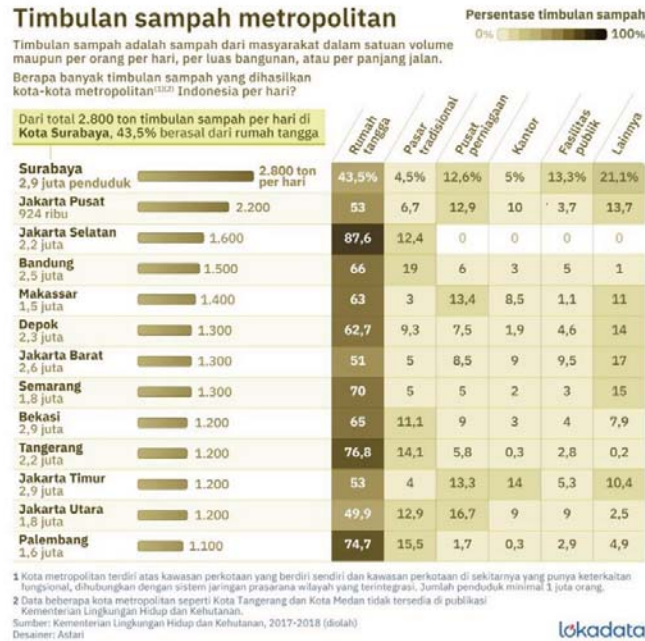
Dari data gambar di atas, diketahui di daerah Kertajaya, Surabaya, Indeks Kualitas Udara berada pada nilai 64, sehingga bagi seseorang yang memiliki permasalahan pernapasan, sebaiknya tetap menggunakan masker di ruangan terbuka dan bisa menggunakan *purifier* di ruangan tertutup. Data Indeks Kualitas Udara dari DLH Kota Surabaya dan beberapa platform lain, seperti IQAir dan Nafas dapat diketahui bahwa memang kondisi kualitas udara di Surabaya ini dinilai cukup baik dan berdasarkan data dari DLH juga selalu meningkat tiap tahunnya.

Berdasarkan data di atas, diketahui Indeks Kualitas Air di Kota Surabaya berada pada nilai 57,69 dari 100, yang berarti Indeks Kualitas Air di Surabaya ini bisa dikatakan masih berada posisi tengah atau cukup baik. Hal ini dapat dikatakan seperti itu, karena masih terdapat beberapa permasalahan yang terjadi di Surabaya, seperti limbah pemukiman yang masuk ke sungai ketika musim penghujan. Dilansir dari news.detik.com diketahui bahwa kualitas air tidak semakin baik karena adanya limbah di pemukiman yang masuk ke sungai dan hal ini juga diakibatkan oleh rendahnya kesadaran masyarakat terhadap permasalahan lingkungan. Selain itu,

penurunan kualitas air sungai juga ditandai oleh penurunan kadar oksigen terlarut dalam air dan hal ini juga dapat menimbulkan fenomena ikan mabuk. Rendahnya kualitas air di Surabaya juga disebabkan oleh beberapa industri di Surabaya yang masih membuang limbah ke sungai.

Selain itu, masih juga banyak terjadi permasalahan pencemaran air yang dipicu oleh meningkatnya jumlah penduduk kota, pencemaran air yang meningkat adalah akibat dari limbah pertanian, industri, kegiatan usaha, limbah rumah tangga seperti deterjen, dan peternakan. Pemanfaatan air di Surabaya didominasi oleh penggunaan rumah tangga seperti mencuci, mandi, kakus, dan sumber air oleh PDAM. Penurunan kualitas air dapat menyebabkan potensi penurunan kualitas air permukaan dan air tanah, serta kondisi air laut fluktuatif. Selain itu, penurunan kualitas air juga menyebabkan terjadinya penyakit yakni diare. Penyakit ini adalah salah satu penyakit yang banyak diderita akibat sanitasi di Surabaya. Untuk melihat kualitas air di Surabaya, maka pemantauan kualitas air dilakukan oleh PDAM Kota Surabaya dan Dinas Kesehatan Kota Surabaya.

Dilansir dari antaranews.com pengelolaan sampah nasional masih berada di bawah 50% dari target. Hal itu menjadi salah satu tantangan bagi pemerintah dalam menyelesaikan permasalahan tersebut. Berikut adalah data sampah kota metropolitan Indonesia



Gambar 1. 3 Timbulan Smpah Metropolitan Sumber lokadata

Dari data gambar diatas dapat diketahui bahwa Kota Surabaya adalah kota yang menghasilkan sampah sebanyak 2.800 ton per hari, dengan presentase 43,5% sampah yang berasal dari sampah rumah tangga. Kota Surabaya menjadi kota terbanyak dalam menghasilkan sampah. Timbulan sampah yang belum dikelola dengan baik akan berdampak pada munculnya penyakit seperti demam berdarah, diare, dan *thypoid* sehingga perlu adanya pengelolaan sampah yang lebih baik lagi. Salah satu tempat pembuangan sampah di Surabaya adalah TPA Benowo yang merupakan tempat pembuangan akhir sampah sebagian Kota Surabaya yang berbatasan dengan Kabupaten Gresik.

Keberadaan TPA Benowo ini berpengaruh terhadap kondisi lingkungan sekitar yang berkaitan dengan pencemaran air dan udara yang terjadi disekitar tempat pembuangan sampah Benowo, yang mana meskipun sudah terdapat teknologi modern pengolah sampah, masalah pencemaran udara di daerah sekitar masih belum teratasi. Kemudian, keberadaan TPA Benowo juga mempengaruhi kehidupan masyarakat sekitar, seperti bau tidak sedap sampai pada lingkungan tempat tinggal oleh warga yang jauh dari lokasi TPA dan masalah perubahan warna

air sehingga sumber air bersih tidak bisa digunakan. Diketahui dari hasil penelitian Suwendar (2019) adanya TPA Benowo ini berdampak pada persepsi masyarakat yang berkaitan dengan kenyamanan tinggal di area pembuangan akhir, yang mana masyarakat merasa bisa mentoleransi pencemaran lingkungan yang ada disana meskipun mereka mengetahui bahwa pencemaran di tempat pembuangan akhir tersebut, serta masyarakat daerah TPA Benowo juga masih cukup nyaman tinggal disana, sehingga hal ini dapat diketahui bahwa terdapat faktor budaya masyarakat sekitar TPA Benowo yakni toleransi akan hal yang sebenarnya masih dianggap belum biasa bagi sebagian orang.

Tidak hanya di TPA Benowo saja sampah di Surabaya menumpuk, di pesisir Pantai Kenjeran juga terdapat beberapa sampah yang masih berserakan dan hal ini tentunya dapat mencemari air. Kondisi ini membuat masyarakat, termasuk lembaga swadaya masyarakat Tunas Hijau tergugah hatinya, yang mana LSM Tunas Hijau melaksanakan Bersih Pantai Kenjeran Bersama dengan para finalis pangeran dan puteri lingkungan hidup 2021 sebagai upaya untuk membuat lingkungan menjadi bersih. Dilansir dari surabayasehat.com, aksi bersih pantai ini mengumpulkan sebanyak $\frac{3}{4}$ truk sampah, yang mana sampah tersebut akan dipindahkan ke TPA Benowo

Terjadinya kondisi ini, tidak terlepas dari peran sekaligus tanggung jawab Dinas Lingkungan Hidup Kota Surabaya, yang mana dalam hal ini Dinas Lingkungan Hidup Kota Surabaya yang turut serta dalam perencanaan, perlindungan, dan pengawasan lingkungan, serta penanggulangan dan pemulihan dampak lingkungan agar tercapai pembangunan Kota Surabaya yang berkelanjutan. Hal ini juga tercantum dalam visi Dinas Lingkungan Kota Surabaya, yakni “Mewujudkan lingkungan hidup Kota Surabaya yang berkualitas dan berkelanjutan”.

Dengan beberapa misi, yakni (1) Mengadakan lingkungan hidup yang berkualitas untuk mendukung Kota Surabaya berbasis ekologi. (2) Mengadakan dan melaksanakan tata ruang yang saling terintegrasi dan memedulkan daya dukung infrastruktur, serta utilitas agar efisien. (3) Menstabilkan tata kelola birokrasi.

Dalam mencapai visi dan misi tersebut, Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Kota Surabaya menyelesaikan permasalahan lingkungan hidup yang berkaitan dengan isu kualitas air dan udara yang ada di Surabaya.

Untuk menyelesaikan permasalahan kualitas air, DLH Kota Surabaya melakukan pemantauan dan monitoring air permukaan dan air tanah dengan mengambil sampel di salah satu badan air. Tak hanya itu DLH Kota Surabaya juga melakukan kegiatan patroli air yang mana kegiatan ini dilakukan dengan menyusuri sungai hingga kawasan muara dengan tujuan memantau kebersihan dan penertiban kawasan permukiman area sungai hingga muara. Kegiatan pemantauan kualitas air juga dibantu oleh PDAM Kota Surabaya dan Dinas Kesehatan Surabaya agar dapat mengontrol dan memonitoring kualitas air yang diproduksi oleh PDAM (Pemerintah Kota Surabaya, 2019).

Selain kondisi air yang meningkat, kondisi udara di Surabaya juga meningkat. Dilansir dari jawapos.com, diketahui bahwa Indeks Kualitas Udara (IKU) di Surabaya meningkat dari tahun sebelumnya. Meskipun tidak meningkat secara signifikan, namun peningkatan ini sudah terjadi selama 5 tahun belakangan. Meningkatnya Indeks Kualitas Udara di Surabaya disebabkan karena bertambahnya Ruang Terbuka Hijau (RTH) di Surabaya setiap tahunnya dan dinilai cukup baik (Jawapos, 2021). Selain itu, DLH Kota Surabaya juga melakukan optimalisasi pengawasan dan pengendalian terhadap sumber pencemar untuk menjaga kualitas udara di Surabaya.

DLH Kota Surabaya melakukan upaya untuk meningkatkan kualitas lingkungan hidup dengan menyusun rencana kegiatan secara strategis. DLH Kota Surabaya memiliki tugas pokok yang tercantum di dalam Peraturan Walikota Nomor 79 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Uraian Tugas, dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Lingkungan Hidup Kota Surabaya. Berdasarkan Peraturan Walikota tersebut, DLH Kota Surabaya memiliki tugas dan fungsi untuk melakukan sosialisasi kepada masyarakat untuk mendukung peningkatan kualitas lingkungan hidup. Dalam mencapai upaya untuk meningkatkan kualitas lingkungan hidup, Dinas Lingkungan Hidup memiliki fungsi untuk merumuskan kebijakan,

melaksanakan kebijakan, evaluasi, dan melaksanakan administrasi Dinas sesuai dengan lingkup tugasnya masing-masing (Pemerintah Kota Surabaya, 2016).

Adanya strategi dan arah kebijakan untuk meningkatkan kualitas air dan udara dibuktikan dengan terlaksananya program yang dilakukan oleh DLH Kota Surabaya, yakni program pengendalian dan pengawasan dampak lingkungan, peningkatan kapasitas pemahaman dan evaluasi lingkungan hidup, serta program pengadaan prasarana air limbah domestik rumah tangga. Beberapa program tersebut dilakukan untuk meningkatkan kualitas air dan udara di Kota Surabaya secara berkala mengingat permasalahan lingkungan hidup cukup krusial terjadi di Surabaya. Selain itu, Dinas Lingkungan Hidup Kota Surabaya melakukan beberapa kegiatan dari program lain, yakni sosialisasi yang dilakukan pada tahun 2019 lalu yaitu sosialisasi adiwiyata, pelaksanaan eco campus, dan eco pesantren. Di tahun 2020 diadakan Gerakan Peduli dan Berbudaya Lingkungan Hidup di Sekolah (GPBLHS) dan sosialisasi konversi energi pada kegiatan atau usaha di Kota Surabaya.

Tak hanya melakukan upaya melalui program, tetapi DLH Kota Surabaya melakukan tugas dan fungsi pelayanan publik lingkup lingkungan hidup, melalui beberapa pelayanan, yakni layanan perijinan lingkungan, yakni izin pembuangan air limbah, dan izin TPS limbah B3 yang mana pelayanan ini dilakukan karena tingginya jumlah kegiatan dan usaha di Kota Surabaya yang sebanding dengan tingginya limbah cair dan limbah B3 yang dihasilkan, kemudian pelayanan pencegahan pencemaran air yang dilakukan untuk menjaga kualitas air agar tetap memenuhi target Indeks Kualitas Air (IKA), pelayanan pencegahan pencemaran udara dilakukan untuk menjaga kualitas udara perkotaan agar tetap memenuhi target Indeks Kualitas Udara (IKU), serta pelayanan pengaduan masyarakat mengenai masalah kerusakan dan pencemaran lingkungan.

Meskipun DLH Kota Surabaya telah berhasil meningkatkan IKA dan IKU melalui beberapa program dan kegiatan yang dilakukan, bukan berarti tidak ada permasalahan dan kendala yang terjadi. DLH Kota Surabaya harus menghadapi permasalahan pertumbuhan industri dan jasa yang pesat, pertumbuhan penduduk

yang semakin meningkat, banyaknya kegiatan usaha baru, serta rendahnya pemahaman masyarakat untuk menghemat energi dan sumber daya. Tak hanya itu, terdapat kendala dan masalah yang berkaitan dengan kapasitas DLH Surabaya, yakni keterbatasan kompetensi sumber daya manusia yang dibuktikan dari salah satu susunan organisasi, yakni staf fungsional yang belum terqualifikasi berdasarkan *job description* yang ada

Berdasarkan data dari Dokumen Informasi Kinerja Pengelolaan Dinas Lingkungan Hidup (DIKPDLH) Kota Surabaya tahun 2019, jabatan fungsional di Dinas Lingkungan Hidup Surabaya tidak terqualifikasi berdasarkan *job description* yang ada mengingat dari data di atas kedua jabatan tersebut tidak terqualifikasi dengan jelas hanya jumlah anggotanya saja. Hal ini juga dibuktikan dari program yang diwujudkan, yakni Program Pengendalian dan Pengawasan Dampak Lingkungan Hidup bahwa dalam program tersebut terdapat permasalahan, yakni rendahnya pemahaman, kesadaran dan kemampuan pemilik usaha terkait perizinan dan pengelolaan lingkungan, serta belum optimalnya kinerja infrastruktur pengelolaan air limbah yang mana faktor penghambatnya adalah belum jelasnya terqualifikasi jabatan fungsional di DLH Kota Surabaya (DLH Kota Surabaya, 2019)

Selain itu pencapaian kinerja DLH Kota Surabaya juga belum mencapai target yang telah ditetapkan. Berikut data pencapaian kinerja pelayanan DLH Kota Surabaya

Tabel 1. 3 Pencapaian Kinerja Dinas Lingkungan Hidup Kota Surabaya Tahun 2017-2019

Sasaran	Indikator Jenis Pelayanan	2017		2018		2019	
		Jumlah yang diajukan	Jumlah yang terlayani	Jumlah yang diajukan	Jumlah yang terlayani	Jumlah yang diajukan	Jumlah yang terlayani
Terwujudnya kesiapsiagaan dan kemampuan pemerintah dalam upaya menekan pencemaran air dan udara	Izin Lingkungan	459	170	578	428	501	310
	Izin pembuangan air limbah	102	65	62	36	151	73
	Rekomendasi AMDAL	4	-	6	3	43	18
	Rekomendasi Surat Pernyataan Pengelolaan Lingkungan (SPPL)	135	128	835	803	905	847

Sumber: Dokumen Informasi Kinerja Pengelolaan Dinas Lingkungan Hidup (DIKPDLH) Kota Surabaya Tahun 2019 Halaman 1436 (data diolah)

Pada tabel 1.3, menunjukkan pencapaian kinerja pelayanan DLH Kota Surabaya dalam menekan pencemaran air dan udara melalui pelayanan perizinan dapat dikatakan kurang karena jumlah pelayanan yang diajukan tidak sebanding dengan pelayanan yang terlayani dan tidak sesuai dengan target yang ditetapkan. Pernyataan tersebut membuktikan terdapat permasalahan sumber daya manusia di Dinas Lingkungan Hidup Kota Surabaya. Terdapat permasalahan lain di DLH Kota Surabaya, yakni anggaran meningkat tiap tahunnya dan hal ini juga berpengaruh pada anggaran untuk penanganan permasalahan yang telah direncanakan oleh DLH Kota Surabaya, mengingat program yang direncanakan juga bermacam-macam. Berikut anggaran program yang diselenggarakan oleh Dinas Lingkungan Hidup Kota Surabaya yang tercantum dalam Rencana Strategis tahun 2016-2021

Tabel 1. 4 Anggaran Pendanaan Pelayanan PD Dinas Lingkungan Hidup Berdasarkan Program

Program	2017	2018	2019	2020
Pengelolaan Lingkungan Hidup		2.106.377.364.68 7	2.841.331.651. 128	-
Program Pengendalian dan Pengawasan Dampak Lingkungan	7.937.212.607	7.981.006.331	8.410.302.967	12.622.175.6 85
Program Peningkatan Kapasitas Pemahaman dan Evaluasi Lingkungan Hidup	1.072.849.080	1.585.600.000	1.789.100.000	2.020.400.00 0

Sumber : Perubahan Renstra Dinas Lingkungan Hidup Tahun 2016-2021,
halaman 45

Dari tabel di atas diperoleh gambaran bahwa anggaran pengelolaan lingkungan hidup meningkat, dimana program tersebut dilakukan untuk mewujudkan visi dan misi dari Dinas Lingkungan Hidup untuk melakukan upaya perencanaan, pengawasan, dan pengendalian lingkungan hidup. Tidak hanya untuk program di atas, tetapi terdapat 3 program lain yang anggarannya cukup besar untuk pengelolaan lingkungan hidup, yakni Program Perumahan dan Kawasan Pemukiman sebesar Rp 522.315.809.495, Program Pengelolaan dan Pembangunan Jalan dan Jembatan Rp 519.117.621.233, serta Program Pengembangan dan Pengelolaan Sistem Drainase Kota Rp 451.465.014.673 (Pemerintah Kota Surabaya, 2019).

Meningkatnya jumlah anggaran pada Dinas Lingkungan Hidup Kota Surabaya nyatanya tidak diimbangi dengan kinerja yang seharusnya bisa ditingkatkan lagi oleh DLH Kota Surabaya, sehingga meskipun dana yang dianggarkan selalu meningkat dan dapat dikatakan berhasil dalam suatu program maka pemerintah DLH Kota Surabaya sebaiknya lebih meningkatkan kualitas kinerjanya dengan memberikan pelayanan yang baik. Alokasi anggaran tersebut

telah disesuaikan dengan kebutuhan Kota Surabaya untuk mencapai kesejahteraan sosial masyarakat, lingkungan yang bersih, sanitasi yang baik, serta rumah yang layak bagi penduduk sehingga dapat meningkatkan kenyamanan dan kemudahan masyarakat untuk memenuhi kebutuhan (Pemerintah Kota Surabaya, 2019).

Namun, meningkatnya anggaran tidak dapat dipastikan bahwa bisa menangani permasalahan lingkungan lainnya, sehingga Dinas Lingkungan Hidup Kota Surabaya membutuhkan strategi yang komprehensif agar permasalahan lingkungan dapat teratasi dengan baik. Selain permasalahan yang sudah disebutkan, Kota Surabaya sendiri memiliki sekitar 200 Instalasi Pengolahan Air Limbah (IPAL) di beberapa titik kota Surabaya yang berfungsi untuk mengolah limbah cair sebelum mengalir ke sungai atau laut sehingga dapat meminimalisir kerusakan lingkungan. Namun, dapat diketahui dari Suminar (2021), Eko Agus selaku kepala Dinas Lingkungan Hidup Surabaya menyatakan bahwa pengawasan IPAL masih rendah akibat terbatasnya jumlah petugas dan hal ini menyebabkan banyak instalasi yang tidak bisa digunakan dengan layak. Kemudian infrastruktur juga diketahui ada beberapa yang tidak bisa difungsikan dengan baik.

Berdasarkan data dan informasi diatas, DLH Kota Surabaya memiliki peran dalam memberikan atau menyelesaikan permasalahan yang ada khususnya tentang kualitas air dan udara. Namun, DLH Kota Surabaya memiliki beberapa keterbatasan yakni, kurangnya kualifikasi dan spesifikasi yang jelas terkait jabatan fungsional yang ada sehingga menyebabkan kurangnya koordinasi, komunikasi dan sinkronisasi, pencapaian kinerja DLH juga tidak sesuai dengan targetnya, terbatasnya jumlah SDM dalam menangani pengawasn IPAL, serta keterbatasan anggaran yang selalu meningkat untuk menangani permasalahan lingkungan yang berkaitan dengan kualitas air dan udara.

Langkah yang dilakukan oleh DLH Kota Surabaya adalah dengan melaksanakan pendidikan dan pelatihan (Diklat) bagi pegawai, seperti Pengawasan dan Pengendalian Dampak Lingkungan, kemudian Diklat Teknis Lingkungan, yang mana dalam diklat tersebut dilakukan dengan tujuan untuk meningkatkan pemahaman para pegawai sehingga dapat memberikan arahan kepada masyarakat

untuk lebih memperhatikan kondisi lingkungan Kota Surabaya. Selain itu, DLH Kota Surabaya juga telah melaksanakan kerjasama dengan kader lingkungan maupun sekolah yang ada di Surabaya dengan tujuan agar seluruh elemen masyarakat dapat membantu menangani permasalahan air dan udara. Diklat dan kerjasama tersebut merupakan bentuk *capacity building* yang dilakukan oleh DLH Kota Surabaya dalam menciptakan tata pemerintahan yang baik dalam menjawab persoalan di dunia, serta dapat menciptakan inovasi baru dalam mencapai tujuan.

Dalam hal ini, *capacity building* yang dilakukan oleh DLH Kota Surabaya memiliki fokus dalam peningkatan organisasi dalam hal memperlancar kekuatan dari dinas untuk mengontrol, mengawasi, dan memberi solusi dari masalah yang menghambat peningkatan kualitas air dan udara di Kota Surabaya. Dengan demikian, peneliti tertarik untuk mengetahui *Capacity Building* atau Pengembangan Kapasitas yang dilakukan oleh DLH dengan melihat dari (dua) tipe pengembangan, yaitu sumber daya dan manajemen. Sumber daya terdiri dari beberapa aspek, yakni sumber daya manusia, serta infrastruktur, teknologi dan sumber daya keuangan. Sedangkan tipe pengembangan manajemen, terdiri dari kepemimpinan strategis, program dan proses manajemen, serta jejaring kerja sama dan hubungan dengan pihak lain. Adapun penelitian terdahulu yang relevan sehingga dapat membantu berjalannya penelitian ini. Berdasarkan dengan penelitian yang dilakukan sebelumnya berhubungan dengan pengembangan kapasitas organisasi, diperlukan penelitian terdahulu sebagai *state of the art* yang peneliti lakukan. *State of the art* merupakan istilah yang dimaksudkan untuk melihat penelitian kita dalam gambaran yang lebih luas dengan menempatkan penelitian di dalam lautan teori. Berikut merupakan studi terdahulu yang penulis gunakan sebagai referensi penelitian yaitu :

1. Penelitian pertama dilakukan oleh Lyngdoh, et al., (2020) yang berjudul “*Capacity-building Initiatives in Non-Communicable Diseases in India*” yang bertujuan untuk mengatasi keterbatasan sumber daya manusia dalam menangani penyakit tidak menular yang mencapai proporsi epidemi di India yang menyebabkan perekonomian mereosot. Hasil

penelitian diperoleh bahwa dengan dilaksanakannya *capacity building*, perawat kesehatan dan praktisi pengobatan alternatif dapat menangani pencegahan dan pengendalian penyakit tidak menular dengan memaksimalkan sistem kesehatan di India dan *capacity building* yang dilaksanakan oleh tiap individu dilakukan melalui pelatihan.

2. Penelitian selanjutnya dilakukan oleh Hawley et al (2020) dengan judul “*Capacity Building for Public Health: Participant Guided Training*” yang bertujuan untuk meningkatkan efektivitas tenaga kesehatan dalam mencegah diabetes dan manajemen diri. Hasil penelitian menunjukkan bahwa dilakukan upaya pelatihan program dan praktik tertentu pada tenaga kesehatan dan berdasarkan survey, pelatihan yang dilaksanakan dapat memenuhi harapan mereka dan pengetahuan yang diperoleh juga bermanfaat.
3. Selanjutnya penelitian yang dilakukan oleh Gnaedinger & Robinson (2011) dengan judul “*Capacity Building in Residential Care*” bertujuan untuk meningkatkan kapasitas perawatan demensia di The Lodge. Hasil penelitian menjelaskan bahwa *capacity building* dilakukan berdasarkan 4 elemen, yakni sumber daya keuangan dan infrastruktur, sumber daya manusia, modal informasi (program, pelatihan), dan kerja sama dengan organisasi lain yang mana dengan itu, para pengurus The Lodge dapat memahami dan menerapkan praktik terbaik dalam perawatan demensia.
4. Selanjutnya, penelitian terdahulu dilakukan oleh Koutra & Edwards (2012) berjudul “*Capacity Building through Socially responsible Tourism Development : A Ghanaian Case Study*”. Penelitian ini bertujuan untuk mengembangkan pariwisata di Ghana, Afrika untuk membantu mengurangi kemiskinan. Penelitian ini berfokus pada peningkatan kapasitas melalui sumber daya manusia, sosial, keuangan, dan lingkungan. Dalam penerapannya, peningkatan kapasitas ini bergantung pada lokasi, budaya, politik, ekonomi suatu wilayah dengan adanya campur tangan dari pemangku kepentingan untuk bisa meningkatkan pengembangan pariwisata dan terhindar dari kemiskinan.

5. Kemudian, penelitian selanjutnya dilakukan oleh Mumghamba et al (2015) dengan judul “*Capacity Building and Financing Oral Health in the African and Middle East Region*”. Penelitian ini bertujuan untuk menerapkan program kesehatan gigi dan mulut di Afrika dan Timur Tengah, yang mana hal ini dilakukan untuk menyetarakan kesenjangan yang ada pada sumber daya dan kondisi keuangan. Oleh karena itu, diperlukan *capacity building* melalui beberapa aspek, yakni *organizational development, workforce development, resource allocation, partnerships, dan leadership*. Dengan dilakukannya *capacity building* melalui aspek tersebut, maka kesenjangan akan berkurang dan perawatan kesehatan mulut dan gigi akan lebih baik.
6. Penelitian yang dilakukan oleh Lawaceng & Sri Rahayu (2020) dengan judul “*Village Capacity Building Strategy In Efforts to Prevent Stunting In Pandeglang*”. Penelitian ini bertujuan untuk mencegah terjadinya stunting di desa, yang mana dalam hal ini diperlukan banyak pihak selain pemerintah untuk meningkatkan kapasitas desa untuk mencegah stunting. Hasil penelitian ini dijelaskan bahwa peningkatan kapasitas pemerintah desa dalam menangani stunting dapat berjalan optimal jika didukung dengan kompetensi aparatur desa yang professional, seperti dilakukan sosialisasi dan komunikasi oleh tenaga kesehatan di puskesmas kepada kader posyandu, sehingga permasalahan stunting dapat teratasi tanpa memerlukan rujukan ke rumah sakit. Selain itu juga kemampuan organisasi juga menjadi salah satu hal yang dapat menangani stunting di Kabupaten Pandeglang.
7. Penelitian terdahulu dilakukan oleh Gita Ratri Prafitri dan Maya Damayanti yang ditulis pada tahun 2016 dan dipublikasikan dalam Sinta dengan judul “Kapasitas Kelembagaan dalam Pengembangan Wisata (Studi Kasus : Desa Wisata Ketenger, Banyumas)”. Penelitian ini dilakukan dengan metode deskriptif kualitatif dengan tujuan untuk mengembangkan potensi wisata melalui pengembangan desa wisata. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa peningkatan kapasitas

organisasi sudah berjalan dengan baik dengan dibuktikan dengan adanya aspek kemitraan eskternal, pengembangan potensi wisata, dan promosi desa. Kemudian peningkatan kapasitas individu dikatakan cukup baik karena individu masih ada yang kurang memahami dalam pengaplikasian konsep desa wisata (Prafitri & Damayanti, 2016).

8. Penelitian terdahulu dilakukan oleh Hidayat (2016) dengan judul “Pengembangan Kapasitas Badan Keswadayaan Masyarakat : Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri Perkotaan Di Kecamatan Rantau Selatan”. Penelitian ini dilakukan dengan metode *mixed method* dengan tujuan untuk mengetahui pengembangan kapasitas Badan Keswadayaan Masyarakat. Hasil penelitian ini adalah pengembangan kapasitas kelembagaan dan individu yang dilakukan masih belum optimal, yakni terdapat 9 Badan Keswadayaan Masyarakat di Kecamatan Rantau Selatan tetapi hanya 4 yang beroperasi. Kemudian, sarana prasarana, kepemimpinan, serta perilaku dan etika merupakan variable yang berhasil mencapai pelaksanaan program.
9. Selanjutnya penelitian oleh Kristina Setyowati dan Didik Gunawan S (2015) dengan judul “*Capacity Building* : Unit Pengelolaan Sampah dalam Perspektif *Governance* di Pasar Bunder Kabupaten Sragen”. Penelitian ini bertujuan untuk mencapai efektivitas pemberdayaan pengelolaan sampah, sehingga diperlukan *capacity building* untuk meningkatkan pengetahuan, kemampuan manajerial, serta peningkatan sumber daya manusia. Pada pelaksanaannya diperlukan penguatan penguatan, kompetensi, sarana prasarana, serta bantuan operasional, serta adanya keterlibatan pemerintah, pihak swasta, dan masyarakat.
10. Penelitian terdahulu selanjutnya oleh Aruni (2021) dengan judul Implementasi Kebijakan Peraturan Walikota Surabaya No 21 Tahun 2019 Tentang Pelayanan Perizinan Amdal di Dinas Lingkungan Hidup Kota Surabaya. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui implementasi kebijakan terakit pelayanan perizinan yang masih belum efektif dan efisien. Dalam hal ini, masih terdapat kendala, yakni SOP masih belum

berlaku secara baik dan kurangnya ketelitian dalam pengoreksian data, sehingga diperlukan peningkatan sumber daya.

Dari penjelasan literatur di atas persamaan penelitiannya adalah membahas tentang *capacity building*. Perbedaan riset penulis ini adalah melakukan identifikasi *capacity building* pada Dinas Lingkungan Hidup Kota Surabaya, yang mana peneliti menggunakan teori *Organizational Capacity Building* dengan beberapa aspek, yakni sumber daya manusia; infrastruktur, teknologi, dan sumber daya keuangan; kepemimpinan strategis; program dan proses manajemen; serta jaringan dan hubungan dengan pihak lain, serta adanya celah dari penelitian terdahulu yang berkaitan dengan Implementasi Kebijakan Peraturan Walikota Surabaya No 21 Tahun 2019 Tentang Pelayanan Perizinan Amdal di Dinas Lingkungan Hidup Kota Surabaya membuat penelitian ini memiliki kelebihan yang dapat mengisi celah dari penelitian sebelumnya karena penelitian ini menggunakan 5 aspek *organizational capacity building*. Oleh karena itu teori tersebut dapat digunakan untuk mengidentifikasi *capacity building* di dalam Dinas Lingkungan Hidup dalam meningkatkan kualitas air dan udara di Kota Surabaya.

1.2 Rumusan Masalah

Bagaimana *capacity building* yang dilakukan oleh Dinas Lingkungan Hidup Kota Surabaya dalam meningkatkan kualitas air dan udara di Surabaya ?

1.3 Tujuan Penelitian

Berdasarkan latar belakang dan rumusan masalah yang telah dipaparkan, maka tujuan dari penelitian ini adalah mendeskripsikan *capacity building* yang dilakukan oleh Dinas Lingkungan Hidup dalam meningkatkan kualitas air dan udara di Surabaya.

1.4 Manfaat Penelitian

1.4.1 Manfaat Akademis

Manfaat akademis dari penelitian ini adalah :

1. Penelitian diharapkan dapat menjawab dan memberikan penjelasan terkait rumusan masalah yang telah dipaparkan dalam penelitian, serta digunakan

sebagai pengembangan Administrasi Publik mengenai *capacity building* Dinas Lingkungan Hidup Kota Surabaya.

2. Memberikan wawasan baru yang lebih luas dan dapat menjadi referensi yang berkaitan dengan *capacity building* organisasi bagi pihak lain.

1.4.2 Manfaat Praktis

Manfaat praktis penelitian ini adalah penelitian ini diharapkan dapat dijadikan rekomendasi dan referensi bagi pihak lain, seperti organisasi perangkat daerah atau institusi lain yang berkaitan dengan *capacity building* organisasi di Dinas Lingkungan Hidup Kota Surabaya agar dapat memaksimalkan kinerjanya secara optimal dan dapat berdampak baik untuk kepentingan masyarakat dengan adanya kebijakan yang lebih baik untuk meningkatkan lingkungan yang sehat dan bersih.

1.5 Kerangka Konseptual

1.5.1 *Capacity Building* / Pengembangan Kapasitas

1.5.1.1 Pengertian *Capacity Building* / Pengembangan Kapasitas

Berkembangnya dinamika lingkungan di dalam organisasi, menyebabkan organisasi harus dapat mencapai tantangan sekaligus tuntutan yang ada. Salah satu cara yang bisa dilakukan organisasi untuk menghadapi perubahan lingkungan yakni dengan menjalankan tujuan organisasi dengan cara meningkatkan kemampuan sumber daya yang, struktur, sistem organisasi secara efektif dan efisien melalui pengembangan kapasitas atau biasa disebut *capacity building*. Hal ini sependapat dengan apa yang dikemukakan oleh Brown, LaFond, & Macintyre (2001) mendefinisikan kapasitas sebagai berikut:

“Capacity building as a process that improves the ability of a person, group, organization, or system to meet its objectives”

Yang artinya pengembangan kapasitas adalah proses yang dilakukan seseorang, organisasi, atau sistem untuk mencapai kemampuannya agar tujuannya dapat tercapai. Lebih lanjut, Grindle (2012) mendefinisikan pengembangan sebagai berikut:

“Capacity building is intended to encompass a variety of strategies that have to do with increasing the efficiency, effectiveness, and responsiveness of government performance”

Yang artinya pengembangan kapasitas adalah upaya yang dilakukan untuk meningkatkan strategi kinerja pemerintah agar dapat meningkatkan efisiensi, efektivitas, dan responsivitas. Untuk meningkatkan hal tersebut dibutuhkan sumber daya manusia yang memadai, organisasi yang *capable*, dan reformasi kelembagaan untuk mencapai *outcome* yang sesuai dengan tujuan.

Pengembangan Kapasitas menurut Keban (1999) yang berfokus pada bidang pemerintahan, berpendapat bahwa Pengembangan Kapasitas berkaitan dengan beberapa upaya, yakni untuk memperbaiki kualitas sumber daya manusia, meningkatkan kualitas organisasi, dan merubah konteks lingkungan sebagai kebutuhan dari individu dan organisasi. Pendapat mengenai pengertian *Capacity Building* juga dikemukakan oleh Milen (2001) yang mengatakan bahwa *capacity building* adalah proses meningkatkan kemampuan melaksanakan fungsi dan tujuan, menyelesaikan permasalahan, mencapai tujuan, serta memahami kebutuhan pembangunan berkelanjutan yang dilakukan oleh individu, kelompok, organisasi, dan masyarakat. Milen melihat *capacity building* lebih efektif karena dipengaruhi oleh keseluruhan, yakni sistem, lingkungan, individu, organisasi, dan masyarakat.

Straussman, (2007) dalam Fanany, et al (2011) menjelaskan bahwa *capacity building* diindikasikan sebagai sarana untuk memastikan keberlangsungan suatu organisasi dengan membangun kekuatan kelembagaan dan mengurangi ketergantungan pada individu. Morrison (2006) juga menjelaskan bahwa *Capacity Building* adalah sebuah proses perubahan dalam menyusun strategi yang menghubungkan pembelajaran dengan perubahan yang dilakukan untuk menyesuaikan kondisi individu maupun organisasi di lingkungan baru yang dilakukan baik oleh individu, kelompok, organisasi, maupun sistem. Penjelasan tersebut mengacu pada perubahan pengembangan kapasitas yang terbagi menjadi tiga level, yakni pengembangan kapasitas individu, organisasi, dan sistem. Tiap level memiliki beberapa aspek yang berbeda, diantaranya adalah di level individu

terdiri dari aspek pengetahuan, keterampilan, kompetensi, dan etika. Kemudian di level organisasi terdapat beberapa aspek, yakni sumber daya, ketatalaksanaan, struktur organisasi, dan proses pengambilan keputusan. Dan terakhir adalah level sistem yang terdiri dari aspek peraturan perundang-undangan dan kebijakan.

Berdasarkan penjelasan dari beberapa ahli mengenai pengertian dari *capacity building* di atas, yang dimaksud dengan *Capacity Building* adalah proses untuk meningkatkan kapasitas individu, organisasi untuk melaksanakan fungsi organisasi, menyelesaikan masalah, dan menyusun strategi sehingga dapat mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Dengan dilakukannya *capacity building*, diharapkan pihak yang terlibat dapat berkontribusi di dalam kegiatan ataupun program yang dilaksanakan.

1.5.1.2 Tingkatan *Capacity Building*

Capacity building tidak hanya dilihat dari proses pembelajaran namun upaya ini dapat dilakukan dengan mengukur pencapaian yang telah ditentukan dalam jangka waktu Panjang atau pendek. Dalam melaksanakan *capacity building* maka dibagi ke beberapa tingkatan yang berkaitan dengan berbagai aspek. Menurut UNDP (1998), kapasitas terdiri dari beberapa tingkatan, yakni sebagai berikut :

1. *The System Level*

Tingkatan sistem adalah tingkatan tertinggi dalam kapasitas. Sistem yang dimaksud terdiri dari masyarakat, seluruh negara, dan komponen lain yang saling berkaitan. Sistem dapat terdiri dari beberapa komponen yang relevan seperti program pembangunan dan desentralisasi. Level ini juga terdiri dari beberapa dimensi kapasitas, yakni dimensi kebijakan, dimensi hukum, dimensi manajemen dan akuntabilitas, dimensi sumber daya, dan dimensi proses.

2. *The Entity of Organisation Level*

Pada tingkatan organisasi ini dilakukan penguatan *capacity building*, yang meliputi, sumber daya manusia, proses, sub unit organisasi (divisi, unit, dan kelompok kerja). Level ini juga terdiri dari beberapa dimensi

kapasitas, yakni misi dan strategi, budaya dan kompetensi, proses, sumber daya, sumber keuangan, sumber informasi, dan infrastruktur.

3. *The Individual Level*

Tingkatan kapasitas individu dilakukan berdasarkan job deskripsi tiap individu yang telah ditetapkan oleh atasan berdasarkan jabatan dan keterampilan yang dimiliki oleh individu.

Pendapat tersebut juga sejalan dengan pendapat Mowbray (2005), bahwa terdapat 3 (tiga) tingkatan dalam kapasitas, yaitu :

1. Tingkatan individu

Tingkatan individu adalah tingkatan paling rendah, yang mana dalam tingkatan individu ini upaya pengembangan kapasitas lebih menekankan pada pembelajaran individu untuk bisa meningkatkan kualitasnya melalui peningkatan keterampilan individu, peningkatan pengetahuan dan teknologi, dan peningkatan tingkah laku.

2. Tingkatan organisasi

Tingkatan organisasi ini terdiri dari sumber daya dan budaya tiap organisasi, ketatalaksanaan, dan struktur organisasi atau sistem pengambilan keputusan. Hal ini semua saling berkaitan dan berhubungan dalam meningkatkan kapasitas organisasi.

3. Tingkatan sistem

Tingkatan sistem adalah tingkatan yang paling tinggi. Tingkatan sistem berkaitan dengan kerangka kerja yang saling berhubungan dengan peraturan, kebijakan, dan kondisi dasar untuk mencapai kebijakan yang baik.

Menurut Grindle dalam Mutiarin (2012) mengatakan “*Capacity Building is the combination of strategi direncted to improve efficiency, effectiveness from the government performance, with attention focused on these dimensions :*

1. *Development of the human resource*

2. *Strenghtening organization*

3. *Reformation of institution.*”

Dari penjelasan tersebut, Grindle menyampaikan bahwa tingkatan *capacity building* terdiri dari pengembangan sumber daya manusia, penguatan organisasi, dan reformasi kelembagaan. Kemudian, Keban (2000) menyampaikan bahwa ketiga tingkatan pengembangan kapasitas berkaitan dengan pengembangan sumber daya, seperti melaksanakan pelatihan, pengaturan lingkungan kerja, sistem kondisi lingkungan kerja, pelaksanaan rekrutmen sesuai sasaran, pemberian gaji dan tunjangan. Tidak hanya itu, penguatan organisasi juga dilakukan dengan memperbaiki sistem manajemen, seperti membuat SOP, *job description*, komunikasi dilakukan dua arah, adanya pengambilan keputusan secara menyeluruh, dan struktur manajerial. Pada tingkatan terakhir, yakni reformasi kelembagaan perlu dilakukan adanya perhatian khusus untuk suatu sistem dengan melakukan perubahan aturan hukum dan kebijakan, perubahan dari sistem-sistem tertentu, dan reformasi sistem kelembagaan untuk bisa mendorong adanya perubahan dalam perkembangan pasar dan masyarakat madani.

Soeprapto (2006), juga berpendapat mengenai tingkatan pengembangan kapasitas, yakni :

Tabel 1. 5 Tingkatan dalam *Capacity Building*

Individu	Organisasi	Sistem
- Pengetahuan - Keterampilan - Kemampuan - Pengelompokan kerja - Motivasi - Tingkah Laku	- Pengambilan Keputusan - Struktur Organisasi - Prosedur dan mekanisme pekerjaan - Hubungan atau jaringan - Pengaturan sarana dan prasarana	- Kerangka kerja - Format yang mendukung kebijakan

Sumber : Riyadi, Soeprapto. 2006.

Dari tabel I.5, diketahui bahwa tingkatan *capacity building* terdiri dari tingkatan individu, organisasi, dan sistem.

1.5.1.3 Dimensi *Capacity Building*

Dalam *capacity building* terdapat dimensi, fokus, dan tipe kegiatan. Berikut penjelasan dimensi pengembangan kapasitas menurut Grindle (1997), yakni :

1. Dimensi pengembangan SDM

Dalam dimensi ini fokusnya adalah sumber daya manusia, yang mana dalam hal ini diperlukan kemampuan yang memadai secara profesional. Selain itu, sumber daya manusia juga harus memiliki kemampuan teknis untuk bisa menyelesaikan pekerjaannya dan hal ini dapat dilakukan dengan cara pendidikan dan pelatihan, praktek, dan dengan mengetahui kondisi lingkungan kerja.

2. Dimensi penguatan organisasi

Fokus dalam dimensi ini adalah tata manajemen untuk meningkatkan keberhasilan suatu organisasi dalam fungsi dan perannya. Untuk meningkatkan keberhasilannya dilakukan beberapa kegiatan, yakni memenuhi kapasitas sumber daya yang berkualitas, kepemimpinan yang dapat menilai dan menafsirkan kebutuhan, serta peluang yang ada di luar organisasi, budaya organisasi, serta proses manajemen yang baik.

3. Reformasi kelembagaan

Dalam dimensi ini fokusnya adalah kelembagaan dan sistem makro struktur, yang mana dalam dimensi ini juga berkaitan dengan kebijakan dan kondisi suatu pengaturan kebijakan baik dari internal maupun eksternal.

Grindle mengatakan bahwa *capacity building* dapat menjadi suatu strategi yang bisa ditujukan untuk meningkatkan efektivitas dan efisiensi baik untuk individu, organisasi, maupun sistem. Dan hal ini membutuhkan penguatan pada dimensi pengembangan sumber daya, organisasi, maupun reformasi kelembagaan yang tertata, terstruktur, dan terorganisir dengan baik.

Selain penjelasan di atas, , terdapat beberapa dimensi untuk meningkatkan pengembangan kapasitas organisasi menurut Keban (1999) dan Alam (2015), yakni :

1. Dimensi kebijakan

Dimensi ini terdiri dari perencanaan dan analisis yang strategis untuk kebijakan publik sebagai tujuan untuk menentukan arah pembangunan dan pelayanan publik. Perencanaan dan analisis ini berkaitan dari serangkaian isu yang dijadikan acuan untuk menetapkan kebijakan publik, serta proses untuk menentukan alternatif kebijakan terbaik dalam proyek pembangunan dan pelayanan publik.

2. Dimensi desain organisasi

Struktur dan proses kelembagaan menjadi dasar rencana strategis yang berkaitan dengan pembangunan dan pelayanan publik.

3. Dimensi manajemen

Dimensi manajemen dilaksanakan dengan mengimplementasikan keterampilan pemimpin dalam mencapai tujuan pembangunan dan pelayanan publik.

4. Dimensi akuntabilitas

Dimensi ini berkaitan dengan tanggungjawab pemimpin dan seluruh anggota organisasi untuk bisa menentukan rencana strategis dan perumusan kebijakan. Dalam dimensi ini, upaya manajemen suatu organisasi sangat penting untuk bisa merumuskan upaya yang akan dilakukan.

5. Dimensi moral dan etos kerja

Dimensi ini diharapkan dapat diimplementasikan oleh tiap individu di dalam organisasi agar pekerjaan yang dilakukan dapat selaras dengan tujuan yang ada.

1.5.1.4 *Organizational Capacity Building* / Pengembangan Kapasitas Organisasi

Menurut Horton (2003) terdapat 5 aspek yang berkaitan dengan

organizational capacity building, yang terdiri dari :

1. Sumber Daya

Sumber daya yang dimaksud dalam hal ini terdiri dari sumber daya manusia dan sumber daya infrastruktur, teknologi, dan sumber daya keuangan.

a) Sumber Daya Manusia

Personel atau aspek kepegawaian adalah salah satu aspek penting dalam meningkatkan pengembangan organisasi. Kebutuhan akan pelatihan adalah kebutuhan prioritas bagi organisasi, oleh karena itu di tiap organisasi akan melakukan berbagai upaya untuk meningkatkan sumber daya manusia untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan.

b) Infrastruktur, Teknologi dan Sumber Daya Keuangan

Sumber Daya infrastruktur, teknologi, dan keuangan adalah hal yang secara tradisional dianggap sebagai kapasitas keras di dalam organisasi. Sumber daya ini adalah sumber daya pendukung yang akan terus selalu dikembangkan dan diperbarui untuk memaksimalkan tujuan dari organisasi.

2. Manajemen

Manajemen merupakan salah satu bagian dari *capacity building*, yang mana dengan menciptakan kondisi manajemen yang baik hal ini juga akan berdampak bagi organisasi. Kegiatan manajemen yang dilakukan adalah perencanaan, mengorganisasi, mengarahkan, mengontrol, pengambilan keputusan, kepemimpinan, pengendalian, motivasi, hubungan kerjasama, dan lainnya. Beberapa kegiatan ini diringkas menjadi beberapa aspek, yakni :

c) Kepemimpinan Strategis

Kapasitas pertama yang berkaitan dengan manajemen adalah kepemimpinan strategis. Dalam hal ini, kepemimpinan

strategis merupakan salah satu aspek *capacity building* yang dibutuhkan untuk mengetahui kebutuhan dan peluang yang ada di luar organisasi. Kepemimpinan strategis dilakukan untuk dapat mempengaruhi, menetapkan tujuan, menyamakan tujuan seluruh individu di dalam organisasi untuk saling berkomitmen dan termotivasi untuk bisa bertanggung jawab dengan apa yang dikerjakan. Peran pemimpin di dalam aspek ini sangat penting untuk bisa mengarahkan individu ke arah yang lebih baik.

d) Program dan Proses Manajemen

Kemudian, program dan proses manajemen merupakan aspek *capacity building* yang berkaitan dengan manajemen. Dalam aspek ini, seluruh anggota organisasi diharapkan dapat melaksanakan kinerjanya dengan baik sebagai upaya untuk mencapai tujuan organisasi.

e) Jejaring Kerja Sama dan Hubungan dengan Pihak Lain

Kerja sama dan menjalin hubungan baik dengan pihak lain menjadi aspek penting di dalam organisasi agar organisasi dapat berinteraksi dan mengembangkan organisasi. Aspek ini menekankan seluruh individu di dalam organisasi untuk saling berkomunikasi untuk memudahkan kegiatan yang dilaksanakan.

Lissane Brown (2001) menjelaskan beberapa hal yang harus diperhatikan untuk mengembangkan kapasitas, yakni struktur, proses, dan sistem manajerial yang harus dikuasai oleh organisasi untuk bisa beradaptasi dengan perubahan yang dinamis. Serta, diperlukan adanya sarana dan prasarana yang memadai, sumber daya, dan jaringan, untuk memaksimalkan pengembangan kapasitas .

Riyadi Soeprapto juga menjelaskan beberapa upaya untuk melakukan penguatan *capacity building* di tingkat organisasi, yakni :

1. Proses Pengambilan Keputusan

Proses pengambilan keputusan adalah alternatif yang dilakukan untuk menyelesaikan masalah dengan memilih solusi sesuai dengan harapan. Dalam pengambilan keputusan harus jelas mana yang akan diambil dan tidak. Terlalu banyak pilihan dan pertimbangan juga akan membuat pengambilan keputusan menjadi bingung. Sehingga dapat disimpulkan bahwa proses pengambilan keputusan adalah proses yang dilaksanakan untuk memutuskan pilihan dan tindakannya untuk menyelesaikan permasalahan dalam organisasi.

2. Prosedur dan Mekanisme Kerja

Prosedur adalah tahapan awal yang dilaksanakan secara urut berdasarkan waktu dan tata cara yang ada, sehingga organisasi memiliki mekanisme kerja sesuai peraturan agar bisa mewujudkan tujuan bersama.

3. Pengaturan Sarana dan Prasarana

Pengaturan sarana dan prasarana merupakan penerapan pengembangan kapasitas sebagaimana sarana dan prasarana dibutuhkan organisasi untuk bisa memperlancar kegiatan yang dilaksanakan. Selain itu, sarana dan prasarana juga harus ditetapkan berdasarkan standar yang sesuai dan tentunya juga diperlukan upaya pemeliharaan agar sarana dan prasarana dapat digunakan untuk jangka waktu yang panjang.

4. Hubungan atau Jaringan

Dalam mencapai tujuan organisasi, diperlukan hubungan atau jaringan dilakukan oleh individu dan organisasi untuk bisa saling berkomunikasi, berbagi informasi, dan ide. Dalam hal ini, dengan membangun jaringan dan hubungan agar berjalan secara efektif diperlukan adanya kemampuan untuk berinteraksi dan

bekerja sama dengan individu, mitra, maupun organisasi.

5. Struktur Organisasi

Struktur organisasi dapat diketahui dari adanya susunan organisasi yang tergambar jelas garis yang berkaitan dengan mekanisme maupun komando dan wewenang dan dari adanya garis tersebut dapat diketahui bagaimana pertanggung jawaban dari struktur organisasi tertinggi hingga terendah.

Dari kedua aspek yang dikemukakan oleh para ahli, untuk mengetahui bagaimana *organizational capacity building* DLH Kota Surabaya dalam meningkatkan kualitas air dan udara, maka dalam penelitian ini digunakan *organizational capacity building* yang terdiri dari 5 aspek oleh Horton, yang terdiri dari sumber daya manusia; infrastruktur, teknologi, dan sumber daya keuangan; kepemimpinan strategis; program dan proses manajemen; serta jejaring kerjasama atau hubungan dengan pihak lain.

1.5.2 Lingkungan Hidup

Lingkungan hidup merupakan kesatuan ruang yang saling mempengaruhi satu sama lain di dalam kehidupan dan kesejahteraan yang terdiri dari benda, daya, keadaan, dan makhluk hidup, serta perilakunya (Undang Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, 2009). Untuk melakukan upaya pelestarian dan mencegah adanya kerusakan lingkungan diperlukan pengelolaan dan perlindungan, seperti perencanaan, pemanfaatan, pengawasan, dan upaya penegakan hukum.

Menurut Manik (2016) ekosistem merupakan hubungan timbal balik antara makhluk hidup (hayati) dengan unsur non-hayati yang mana hubungan ini terbentuk dari adanya interaksi. Unsur hayati dalam ekosistem terdiri dari tumbuhan, hewan, mikroorganisme, dan manusia. Kemudian, untuk unsur non-hayati terdiri dari tanah, air, batu, udara, dan lainnya. Dengan adanya interaksi tersebut, ekosistem dapat mempengaruhi makhluk lain yang ada di bumi. Untuk menjamin keutuhan, keselamatan, dan kesejahteraan lingkungan hidup maka diperlukan upaya

pembangunan berkelanjutan yang terencana yang tertuang dalam Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (RPPLH).

Selain RPPLH, upaya pembangunan berkelanjutan dapat dituangkan di dalam Kajian lingkungan hidup strategis (KLHS) yang berisi tentang analisis mengenai pembangunan atau kebijakan di suatu wilayah. Analisis mengenai dampak lingkungan (Amdal) merupakan upaya pengambilan keputusan mengenai penyelenggaraan kegiatan yang berkaitan dengan lingkungan hidup dengan tujuan lingkungan tetap terjaga dan tidak berdampak negatif bagi makhluk lain. Upaya pemantauan dan pengelolaan lingkungan juga perlu dilakukan untuk memantau usaha atau kegiatan yang memiliki dampak penting terhadap kondisi lingkungan.

1.5.2.1 Kebijakan dalam Pengendalian Lingkungan Hidup

Untuk mendukung terciptanya lingkungan hidup yang seimbang, maka telah ditetapkan kebijakan dan berbagai peraturan perundang-undangan, salah satunya yakni UU RI No 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup. UU tersebut bertujuan untuk melindungi wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia dari permasalahan lingkungan dan menjamin keberlangsungan makhluk hidup dan ekosistem, menjamin pemenuhan hak lingkungan hidup, memanfaatkan sumber daya alam, mewujudkan pembangunan berkelanjutan, serta mengantisipasi terjadinya isu global yang berkaitan dengan lingkungan.

Adanya kebijakan lingkungan hidup, diharapkan lingkungan dapat selaras dan saling mempengaruhi antara satu makhluk hidup dengan makhluk hidup lain. Oleh karena itu, kebijakan lingkungan diperlukan pengelolaan lingkungan hidup yang dapat membenahi mutu lingkungan agar usaha untuk mencapai pembangunan berkelanjutan dapat tercapai dan terpenuhi. Keberhasilannya, dapat diketahui dari kemampuan daerah atau negara dalam mengelola lingkungan, sehingga untuk melaksanakannya diperlukan instrument yang berkaitan dengan pengaturan dan pengawasan.

1.6 Definisi Konsep

1. *Capacity Building*

Capacity building adalah proses untuk meningkatkan kapasitas individu, organisasi, dan sistem secara berkelanjutan untuk dapat bertahan dari adanya perubahan lingkungan yang dinamis, sehingga semua komponen dapat mencapai tujuan dan kinerja bersama di dalam suatu organisasi.

2. *Organizational Capacity Building*

Organizational Capacity Building adalah tingkatan pengembangan kapasitas yang memperkuat lingkup organisasi dengan beberapa aspek di dalamnya. Dalam penelitian ini pengembangan kapasitas organisasi Dinas Lingkungan Hidup Kota Surabaya menekankan kepada beberapa aspek yakni, untuk meningkatkan sumber daya manusia, infrastruktur, teknologi, dan sumber daya keuangan, kepemimpinan strategis, program dan proses manajemen, serta jejaring kerjasama dan hubungan dengan pihak lain.

3. **Lingkungan Hidup**

Lingkungan hidup merupakan kesatuan ruang yang saling mempengaruhi dan berkaitan di dalam kehidupan dan kesejahteraan manusia, serta makhluk hidup lainnya.

1.7 Metode Penelitian

Metode penelitian adalah instrumen yang digunakan untuk menjawab masalah penelitian. Penelitian ini menggunakan pendekatan *interpretative approach* dengan metode penelitian kualitatif melalui observasi, wawancara, dan dokumentasi. Menurut Neuman (2014) pendekatan *interpretative* menekankan pada tindakan sosial yang dilakukan secara langsung dengan orang yang terlibat di lingkungan sosial sehingga peneliti dapat mempelajari secara langsung tingkah laku dan interaksi yang terjadi. Pendekatan *interpretative* adalah dasar dari teknik penelitian sosial, yang mana pendekatan ini berkaitan dengan bagaimana seseorang melakukan interaksi satu sama lain untuk mendapatkan informasi dan informasi yang didapatkan bisa diinterpretasikan secara rinci dan jelas, sehingga dalam penelitian ini digunakan metode penelitian kualitatif.

Menurut Moleong (2018), penelitian kualitatif dapat digunakan untuk memahami, mengungkapkan, dan menemukan pengetahuan dari suatu fenomena yang masih sedikit diketahui dan berkaitan dengan perilaku, konsep, tujuan, maupun tindakan. Sedangkan menurut pendapat Creswell (2013), dalam penelitian kualitatif berusaha untuk membangun fenomena berdasarkan pandangan partisipan yang dilakukan melalui observasi secara langsung dengan mengetahui dan terlibat di dalam aktivitas mereka. Penelitian ini dilakukan untuk mengeksplorasi proses, aktivitas, dan peristiwa (studi kasus) dengan menganalisis kasus yang terjadi pada individu maupun organisasi. Dari penjelasan tersebut, adapun alasan penggunaan metode penelitian kualitatif ialah karena peneliti berusaha untuk mengungkapkan dan memahami, serta mengeksplor fenomena realitas sosial yang berkaitan dengan *capacity building* yang dilakukan oleh Dinas Lingkungan Hidup Kota Surabaya dalam meningkatkan kualitas air dan udara di Kota Surabaya. Dengan dilakukannya penelitian kualitatif, peneliti juga bisa mengetahui seluk beluk bagaimana Dinas menangani permasalahan lingkungan yang ada di Surabaya dan juga dapat mengetahui adanya hal positif yang dilaksanakan oleh DLH Kota Surabaya yang jarang diketahui oleh masyarakat.

1.7.1 Tipe Penelitian

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk memahami situasi secara obyektif mengenai *capacity building* Dinas Lingkungan Hidup dalam meningkatkan kualitas air dan udara Kota Surabaya. Oleh karena itu, jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian deskriptif. Menurut Neuman (2014) penelitian deskriptif ini bertujuan untuk melukiskan gambaran dengan kata atau angka, serta menyajikan klasifikasi umum untuk menjawab beberapa pertanyaan tentang siapa, kapan, dimana, dan bagaimana. Creswell (2013) juga menjelaskan bahwa penelitian deskriptif memberikan gambaran rinci dari situasi atau kondisi, sikap sosial atau hubungan.

Berdasarkan penjelasan tersebut, penelitian ini akan memberikan gambaran tentang fenomena sosial yang terkait dengan rumusan masalah dan tujuan masalah yakni mengenai realita *capacity building* yang dilakukan oleh Dinas Lingkungan

Hidup Kota Surabaya dalam meningkatkan kualitas air dan udara di Kota Surabaya, sehingga dalam hal ini peneliti dapat memberikan beberapa saran dan masukan untuk DLH Kota Surabaya dengan melihat celah yang terjadi dalam pelaksanaan kinerjanya melalui beberapa aspek, seperti sumber daya manusia, infrastruktur, teknologi, dan sumber daya keuangan, kepemimpinan strategis, program dan proses manajemen, serta jejaring kerjasama dan hubungan dengan pihak lain.

1.7.2 Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian ialah tempat dimana peneliti akan melakukan penelitian untuk mengumpulkan data tentang fenomena sosial secara relevan dengan menemui informan. Menurut Moleong (2018) sebelum memilih lokasi penelitian, ada baiknya seorang peneliti mengetahui kondisi lapangan apakah sesuai dengan kenyataan atau tidak. Dalam penelitian ini lokasi yang dituju adalah Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Kota Surabaya yang berlokasi di Jalan Menur Nomor 31 Surabaya. Alasan peneliti memiliki melakukan penelitian di Dinas tersebut disebabkan karena di dalamnya terdapat pelaku yang menjadi sasaran dari pengembangan kapasitas di DLH Kota Surabaya dalam meningkatkan kualitas air dan udara di Kota Surabaya, serta Kota Surabaya memiliki indeks kualitas air dan udara yang selalu meningkat tiap tahunnya

1.7.3 Teknik Penentuan Informan

Menurut Moleong (2018) Informan adalah orang yang memiliki relevansi dan dapat memberikan informasi yang berkaitan dengan objek penelitian dimana informan dapat menjelaskan beberapa pengetahuannya agar bermanfaat bagi peneliti. Informan berguna untuk membantu peneliti membenamkan peneliti agar peneliti dapat mengetahui kondisi di suatu tempat. Teknik penentuan informan yang digunakan adalah teknik *purposive*, yang mana teknik *purposive* digunakan untuk menentukan informan yang dianggap menguasai dan memahami permasalahan. Informan yang dipilih dalam penelitian ini memuat peran dan keterlibatan dari pihak yang menguasai dan memahami tentang bagaimana *capacity building* yang dilakukan oleh Dinas Lingkungan Hidup Kota Surabaya dalam meningkatkan

kualitas air dan udara di Kota Surabaya. Berikut adalah daftar informan yang terlibat dalam penelitian :

1. Bapak Joni Husainu S.Sos selaku Pengatur Muda Tingkat I Dinas Lingkungan Hidup. Alasan dipilihnya informan ini karena menempati jabatan strategis yang terlibat langsung dalam penetapan dan pelaksanaan *job description* pegawai DLH Kota Surabaya, serta informan juga bertanggung jawab dalam melakukan diskusi dan evaluasi ketika telah melaksanakan kegiatan.
2. Ibu Tiorina S.T, M.T selaku Penata Staf Dinas Lingkungan Hidup. Alasan dipilihnya informan ini karena menempati jabatan yang cukup strategis dalam melaksanakan koordinasi penanganan kasus lingkungan hidup di Surabaya.
3. Bapak Dwi Wahyudi selaku staf Dinas Lingkungan Hidup Bidang Pengendalian Pencemaran dan Keanekaragaman Hayati. Alasan dipilihnya informan adalah karena beliau menempati jabatan pada bidang pengendalian pencemaran dan keanekaragaman hayati yang mana dalam bidangnya ini sangat berkaitan dengan permasalahan udara, yakni dalam pelaksanaan uji kualitas udara.
4. Mbak Lourina Pondaang selaku staf Dinas Lingkungan Hidup Bidang Pemantauan dan Pengendalian Kapasitas Lingkungan Hidup. Alasan dipilihnya informan adalah karena beliau menempati bidang yang berkaitan dengan pemantauan dan pengendalian lingkungan hidup di bagian air, serta juga turut langsung melakukan pemantauan uji kualitas air di beberapa sungai di Surabaya.
5. Mas Andika Danang Prayoga staf Dinas Lingkungan Hidup Bidang Penataan dan Pengawasan Lingkungan Hidup. Alasan dipilihnya informan ini adalah karena beliau memiliki tugas untuk bertanggung jawab melakukan pemantauan ke beberapa kegiatan usaha industri dan melakukan pengecekan perizinan lingkungan yang dimiliki oleh kegiatan usaha tersebut.

6. Mbak Nastiti Sri Fatmawati selaku staf Dinas Lingkungan Hidup Bidang Pemantauan dan Pengendalian Kapasitas Lingkungan Hidup. Alasan dipilihnya informan adalah karena beliau menempati bidang yang berkaitan dengan pemantauan dan pengendalian lingkungan hidup di bagian air, serta juga turut langsung melakukan pemantauan uji kualitas air di beberapa sungai di Surabaya.

1.7.4 Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data adalah tahapan terpenting ketika melakukan penelitian untuk mencapai tujuan penelitian dengan melakukan interpretasi dan analisa data. Data sangat dibutuhkan dalam penelitian, sehingga diperlukan sumber untuk memperolehnya. Menurut Creswell (2013), dalam mengumpulkan data terdapat lima sumber yang dapat digunakan, yakni observasi, dokumentasi, wawancara, materi visual, merekan atau mencatat informasi. Penelitian kualitatif membutuhkan sumber data primer berupa kata-kata atau tindakan yang kemudian akan akan direkam atau ditulis, dan dipilah sesuai kebutuhan. Untuk sumber data sekunder didapatkan dari data dokumen, sehingga dokumen bisa digunakan untuk melengkapi kekurangan data. Berikut beberapa teknik pengumpulan data :

1. Observasi

Observasi ialah teknik yang dilakukan secara langsung dengan melihat dan mengamati kondisi, perilaku, aktivitas, dan lingkungan penelitian. Peneliti melakukan observasi secara *open-ended* dan dilaksanakan secara partisipatif dengan mengajukan beberapa pertanyaan umum dan mengamati keadaan kantor, serta kegiatan yang dilakukan di tempat penelitian. Observasi yang dilakukan dalam penelitian dilaksanakan untuk mengetahui dan memahami kegiatan yang dilaksanakan oleh DLH Kota Surabaya dalam meningkatkan kualitas air dan udara di Kota Surabaya dengan melihat bagaimana budaya kerja, proses manajemen, serta sumber daya dalam dinas.

Dari hasil observasi, ketika peneliti berada di Dinas, peneliti diarahkan oleh pegawai untuk bisa melihat beberapa infrastruktur dan teknologi

yang dimiliki dan diketahui bahwa DLH juga diamanahi oleh KLHK untuk memonitoring *fixed station* Benowo milik KLHK yang berada di Surabaya.

2. Wawancara

Teknik pengumpulan yang dilakukan selanjutnya adalah wawancara. Melalui wawancara, epeneliti akan mendapatkan informasi secara mendalam yang berkaitan dengan fenomena sosial yang terjadi. Wawancara dapat dilakukan secara *face to face* atau telepon dengan informan. Teknik wawancara yang dilakukan adalah wawancara terbuka dengan melibatkan informan yang memahami informasi penelitian dalam meningkatkan kapasitas organisasi dan pengendalian lingkungan hidup, yakni pihak Dinas Lingkungan Hidup Kota Surabaya.

Dari hasil wawancara juga diketahui bahwa Dinas Lingkungan Hidup Kota Surabaya telah melakukan *merger* dengan Dinas Kebersihan dan Ruang Terbuka Hijau Kota Surabaya, sehingga dapat diketahui bahwa dalam pelaksanaan kinerjanya terkadang kedua dinas ini masih tumpang tindih antara satu tugas dengan tugas yang lain.

3. Dokumentasi

Pada tahap ini, peneliti akan mengumpulkan beberapa sumber dokumentasi terkait permasalahan yang ada di dalam penelitian. Teknik pengumpulan data ini dilakukan untuk memperkuat data berdasarkan wawancara dan observasi yang telah dilaksanakan. Dokumentasi dapat berupa gambar, tulisan, atau karya dengan tujuan dokumentasi ini bisa digunakan untuk melebarkan pemahaman terkait sebuah penelitian.

Hasil dokumentasi penelitian ini juga didapatkan dari foto pribadi yang dimiliki oleh beberapa pegawai dinas ketika sedang mengimplementasikan bimbingan teknis yang dilaksanakan dan kegiatan yang sedang berlangsung.

1.7.5 Teknik Uji Keabsahan Data

Menurut Moleong (2018) keabsahan data atau *trustworthiness* memerlukan teknik pemeriksaan yang didasarkan pada kriteria tertentu. Dalam menetapkan

keabsahan data diperlukan beberapa kriteria, yakni *credibility*, *transferability*, *dependability*, dan *confirmability*. Sedangkan Creswell (2013) menjelaskan bahwa terdapat beberapa strategi untuk menguji keabsahan data, yakni (1) *Triangulate*. *Triangulate* adalah teknik pemeriksaan data dengan tujuan untuk membangun justifikasi tema secara korehen yang berasal dari sumber data yang berbeda; (2) *Member Checking*. Member checking dilakuakn untuk dapat memahami secara teliti laporan yang dimiliki oleh partisipan dengan membawa laporan kembali kepada partisipan yang bersangkutan; (3) *External Auditor*. Teknik ini dilakukan dengan mengkaji ulang proyek penelitian dengan seorang auditor, sehingga auditor dapat memberikan sarannya dalam hasil yang objektif.

Moleong (2018) menjelaskan bahawa triangulasi adalah teknik pengamatan yang dilakukan dengan pendayagunaan selain data untuk bisa digunakan sebagai pembanding data. Triangulasi data meliputi empat sumber dengan memanfaatkan penggunaan sumber, metode, penyidik, dan teori. Dan penelitian ini memanfaatkan penggunaan sumber dan metode. Triangulasi di dalam penelitian ini dilakukan dengan melalui beberapa strategi (1) melakukan perbandingan hasil wawancara dari sumber dokumen, (2) melakukan pembandingan data dengan apa yang dikatakan informan baik secara pribadi dan secara umum, (3) melakukan pembandingan hasil pengamatan dengan dengan hasil wawancara. Dengan adanya triangulasi ini dapat digunakan untuk memeriksa data dalam penelitian, melalui data wawancara, observasi, dan dokumentasi.

1.7.6 Teknik Analisis Data

Setelah memperoleh data, peneliti melakukan analisis data agar data dapat dipahami. Proses analisis data dalam penelitian kualitatif dilakukan dengan menelaah data yang telah didapatkan dari wawancara, observasi, dan dokumentasi. Hal ini dilakukan agar penyajian data dapat bermanfaat dan mudah dipahami, serta dapat diinformasikan secara ilmiah kepada yang lain. Menurut Miles & Huberman (2009), dalam melakukan analisis data terdiri dari beberapa tahap, yakni :

1. Reduksi Data

Proses pertama yang bisa dilakukan ketika melakukan analisis data adalah reduksi data, yang mana dalam reduksi data dilakukan proses pemusatan perhatian, pemilihan, penyederhanaan, dan pengabstrakan data kasar dari catatan hasil data di lapangan. Proses reduksi data terus berlangsung selama penelitian dengan menajamkan, menggolongkan, mengarahkan, dan membuang, serta mengorganisasi data sehingga mendapatkan kesimpulan akhir. Hal ini dapat mempermudah informasi yang didapatkan ketika melakukan penelitian.

2. Penyajian Data

Pada proses penyajian data dilakukan dengan merefleksikan makna dari kumpulan data yang sudah didapatkan. Peneliti mengolah data kasar menjadi tulisan atau gambar atau matriks agar data lebih mudah dimengerti. Sehingga di tahap ini dapat diketahui fenomena apa saja yang terjadi di lapangan.

3. Penarikan Kesimpulan

Setelah proses reduksi data dan penyajian data, maka tahap selanjutnya adalah penarikan kesimpulan dari data yang ada. Penarikan kesimpulan adalah tahap yang penting di dalam proses analisa data, yang mana peneliti menyimpulkan temuan yang didapatkan selama proses penelitian berlangsung.

1.7.7 Rincian Data yang Diperoleh

Berdasarkan data yang diperoleh dan ditemukan oleh peneliti, berikut rincian data yang dikumpulkan, yakni :

Tabel 1. 6 Rincian Data yang Dikumpulkan

No	Rincian Data	Aspek	Realisasi	Keterangan Data
1.	Terkait lingkungan hidup di Kota Surabaya	Permasalahan dan kendala lingkungan hidup	✓	Data diperoleh dari dokumen laporan kinerja pengelolaan lingkungan hidup

				dan wawancara dengan staf DLH Kota Surabaya
2.	<i>Capacity Building</i> Dinas Lingkungan Hidup Kota Surabaya	Berkaitan dengan Sumber Daya Manusia	✓	Data diperoleh melalui wawancara dengan staf DLH Kota Surabaya beserta dokumentasi
		Berkaitan dengan Infrastruktur, Teknologi, dan Sumber Daya Keuangan	✓	
		Berkaitan dengan Kepemimpinan Strategis dan Pengambilan Keputusan	✓	
		Berkaitan dengan Program dan Proses Manajemen	✓	
		Berkaitan dengan Kerjasama dan Hubungan dengan Pihak Lain	✓	